



RENCANA KERJA **PERUBAHAN** TAHUN 2021



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 disusun dengan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi serta nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri No 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mempertimbangkan hasil capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan sampai dengan semester pertama,

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan termakasih dan penghargaan kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan rencana kerja ini

Cimahi, November 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
 DAFTAR ISI..... ii
 DAFTAR TABEL iii
 BAB I PENDAHULUAN 1
 A. LATAR BELAKANG 1
 B. DASAR HUKUM 2
 C. MAKSUD DAN TUJUAN 5
 D. SISTEMATIKA PENULISAN 6
 BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN 7
 A. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH..... 7
 B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 29
 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33
 A. RENCANA KERJA PADA ANGGARAN PERUBAHAN 2021 33
 BAB IV PENUTUP 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Sumber Anggaran...	7
Tabel 1 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan s.d TW II berdasarkan Program.....	8
Tabel 1 Capaian Kinerja Program Kegiatan s.d Triwulan II 2021	9
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021	29
Tabel 5 Capaian SPM Bidang Kesehatan s.d Triwulan II Tahun 2021	30
Tabel 6 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Sumber Anggaran .	33
Tabel 7 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Program	39
Tabel 8 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Kesehata Tahun 2021	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Secara substansi, Renja SKPD memuat evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara usulan tingkat kelurahan dan kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat Dinas serta kajian di tingkat Kota, dan juga mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kota, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,

hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2021 merupakan dokumen yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan setelah dilaksanakan evaluasi kinerja semester 1 tahun 2021 dan mengacu pada keputusan kementerian dalam negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi. Sinergitas berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Kesehatan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
 23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
 24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
 25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
 26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
 27. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 546 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama semester kedua tahun 2021.

2. Tujuan

- a. Melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan di Kota Cimahi terhadap indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya selama semester pertama
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam melanjutkan

penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien serta mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2. Analisa Kinerja Dinas Kesehatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan pada program maupun kegiatan yang direncanakan dalam Rencana strategis maupun rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program maupun Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan ini dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan II tahun 2021. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi target Renja 2021 pada akhir triwulan II.

Jumlah anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 86.240.359.768,-, dengan sumber dari APBD sebesar Rp. 64.347.158.120,- (74,61%) dan Dana Kapitasi JKN sebesar 21.893.201.648,- (25,39%), sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1	APBD KOTA	64.347.158.120,-	74,61
2	KAPITASI JKN	21.893.201.648,-	25,39
	TOTAL	86.240.359.768,-	100

Anggaran tersebut atas digunakan untuk yang terdiri dari 5 program, 19 kegiatan dan 58 sub kegiatan.

Berdasarkan Laporan hasil capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2021, capaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan termasuk realisasi belanja Puskesmas BLUD sebesar Rp. 29.476.148.218,- (34,18%) terhadap pagu anggaran murni, dengan capaian kinerja sebesar 32,02%.

Realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp.19.982.904.439,- (47,17%),

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 3.689.476.494,- (17,56%), BLUD Puskesmas sebesar Rp. 5.768.822.785,- (26,35%), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp 10.000.000,- (2,31%), Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp.21.116.500,- (10,45%), Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp.3.828.000,- (1,14%).

Tabel 2 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan s.d TW II berdasarkan Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
		ALOKASI	REALISASI	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.367.123.780.-	19.982.904.439,-	47,17
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21.010.217.240.-	3.689.476.494,-	19,82
	BLUD Puskesmas	21.893.201.648.-	5.768.822.785,-	25,55
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	433.395.100.-	10.000.000,-	2,31
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	202.019.900.-	21.116.500,-	10,45
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	334.402.100.-	3.828.000 ,-	1,14
	TOTAL	86.240.359.768,-	29.476.148.218,-	34,18

Tabel 3 Capaian Kinerja Program Kegiatan s.d Triwulan II 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun 2021	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP	85	42.367.123.780	-	8.749.358.436	-	16.827.801.868	0	19.982.904.439	-	47,17
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;		50.501.800		19.185.300	-	7.767.000		26.952.300		53,37
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran	6	26.001.900	-	11.698.200	2	-	2	11.698.200	33,33	44,99
		Jumlah Dokumen Renja Dinas	1		1		-		1	-	100,00	
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1		-		-		0	-	-	
		Jumlah Dokumen Renstra Dinas	1		-		1		1	-	100,00	
		Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	2		2		-		2	-	100,00	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1	24.499.900	1	7.487.100	-	7.767.000	1	15.254.100	100,00	62,26
		Jumlah Dokumen Laporan SPM	1		1		-		1	-	100,00	
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2		2		-		2	-	100,00	

		Jumlah Dokumen Monev Kinerja	7		1		1		2	-	28,57	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;		37.389.882.000		8.002.022.902	-	11.014.557.268		19.016.580.170	-	50,86
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan setiap bulan	380	37.317.882.000	380	8.002.022.902	380	11.000.162.268	380	19.002.185.170	100,00	50,92
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12	72.000.000	3	-	3	14.395.000	6	14.395.000	50,00	19,99
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina;		299.905.000	-	-	-			-	-	-
5)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai	100	24.905.000	-	-	-		0	-	-	-
6)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	20	275.000.000	-	-	-		0	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;		580.526.800		27.093.000		37.074.600		64.167.600	50,00	11,05
7)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12	10.002.600	-	-	-		0	-	-	-
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor	12	85.807.700	3	4.053.000	3	3.125.000	6	7.178.000	50,00	8,37

		Jumlah bulan Penyediaan ATK	12		3		3		6	-	50,00	
		Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	5		-		-		0	-	-	
9)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	20.093.300	-	-	-		0	-	-	-
10)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	100.631.200	3	17.290.000	3	19.871.000	6	37.161.000	50,00	36,93
11)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	189.000.000	3	5.750.000	3	7.330.600	6	13.080.600	50,00	6,92
12)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas, Koordinasi, dan Konsultasi SKPD	12	174.992.000	3	-	3	6.748.000	6	6.748.000	50,00	3,86
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan		7.500.000		-				-	50,00	-
13)	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair	60	7.500.000	-	-	-		0	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan		1.896.558.180		155.163.506		196.298.930		351.462.436	50,00	18,53
14)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air	12	1.010.123.580	3	37.088.191	3	10.795.552	6	47.883.743	50,00	4,74
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi	12				3		6	-	50,00	
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik	12		3		3		6	-	50,00	
15)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	886.434.600	3	118.075.315	3	185.503.378	6	303.578.693	50,00	34,25

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		2.142.250.000		233.742.304		289.999.629		523.741.933	50,00	24,45
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	12	1.036.500.000	3	116.671.989	3	105.736.251	6	222.408.240	50,00	21,46
		Jumlah unit kendaraan	27		-		-	-	0	-	-	
		Jumlah Unit Kendaraan yang diservice	3		-		-		0	-	-	
17)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	13	1.105.750.000	3	117.070.315	3	184.263.378	6	301.333.693	46,15	27,25
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting Pada Baduta	12,04	21.010.217.240	11,80	317.344.256	11,80	3.372.132.238	11,80	3.689.476.494	92,03	19,82
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;		2.445.108.270		500.000		506.774.392		507.274.392	100,00	21,83
18)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah bulan penyewaan gedung / gudang	6	159.948.000	-	500.000	-		0	500.000	-	0,31
		jumlah ipal yang diperbaiki	2		-		-		0	-	-	
		jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan	13		-		-		0	-	-	

19)	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan di pelayanan kesehatan	49	144.000.000	-	-	-		0	219.343.392	-	152,32
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik	2		-		-		0	-	-	
20)	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis BMHP Jumlah jenis pengadaan obat	100	2.141.160.270		-	18		18	287.431.000	13,62	13,42
		Jumlah pengadaan Vaksin	60		-		-		18	-		
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator SPM dengan capaian lebih dari 80%		18.274.662.100		297.760.656		2.850.357.846		3.148.118.502	-	19,70
21)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11528	155.690.000	2.571	-	2.376	3.600.000	4947	3.600.000	42,91	2,31
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG	5		-		5,00		5	-	100,00	
		Jumlah peserta Pertemuan sosialisasi program kesehatan ibu dan anak	300		-		-		0	-	-	
22)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11004	504.000.000	2.574	82.040.000	2.434	125.720.000	5008	207.760.000	45,51	41,22
		Penguatan program EMAS	12		3		3		6	-	50,00	

23)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	10696	120.000.000	2.438	-	2.313	-	4751	-	44,42	-
		Jumlah peserta pelatihan/ penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED	40		-		-		0	-	-	
24)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51.988	12.099.500	6.529	-	5.328	-	11857	-	22,81	-
		Dokumen reviu PERDA KIBBLA	1		-		-		0	-	-	
25)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69586	213.900.000	17.121	-	6.543	-	23664	-	34,01	-
		Pembinaan Sekolah Sehat	12		-				0	-	-	
		Pertemuan Program UKS	34		-				0	-	-	
26)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Deteksi dini Faktor Risiko PTM bagi ASN Tingkat Kota Cimahi	1250	285.740.000	-	72.759.400	-	52.021.180	0	124.780.580	-	43,67
		Deteksi IVA Test	1500		1.500		-		1500	-	100,00	
		Jasa Petugas Penunjang P2PTM Keswa	12		3,00		3,00		6	-	50,00	
		Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	368206		50.020		49.552		99572	-	27,04	
		Penguatan pandu PTM di FKTP	82		-		82		82	-	100,00	
		Pertemuan Usia Produktif	144		-		144		144	-	100,00	

		Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi hari Pendengaran Sedunia	6		6				6		100,00	
27)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	49509	133.050.000	15.517	1.500.000	13970	64.732.500	29487	66.232.500	59,56	49,78
		pelayanan kesehatan lanjut usia	30		-		15			-	-	
		Pertemuan Program Lanjut usia	70		-		30		30	-	42,86	
28)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	175157	110.550.000	12.819		12.050	24.630.000	24869	24.630.000	14,20	22,28
		Jumlah Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas Fasyankes	118		-		118,00		118,00	-	100,00	
		Sosialisasi dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi	450		-		-		0	-	-	
29)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9638	110.550.000	2.157	-	2.621	-	4778	-	49,57	-
		Jumlah peserta Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes	144		-		-		0	-	-	
		Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi	450		-		-		0	-	-	

30)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah	288	173.076.000	24	22.500.000	24	64.705.000	48	87.205.000	16,67	50,39
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	775		484		141		625	-	80,65	
		Monitoring dan evaluasiRakor TPKJM dan NAPZA	1		-		-		0	-	-	
		Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1		-		-		0	-	-	
		Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD	26		2		3		5	-	19,23	
		Penguatan Jejaring Lintas Sektor dan Lintas Program	1		-		-		0		-	
		Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	2				2		2		100,00	
31)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	11800	334.315.800	582	8.600.000	906	90.686.600	1488	99.286.600	12,61	29,70
		Bimbingan teknis program TB ke RS dan Puskesmas	38		-		-		0	-	-	
		Konsultasi Program TB	4		-		-		0	-	-	
		Monitoring dan evaluasi Program TB	6		3		3		6	-	100,00	
		Sosialisasi Program TB	10		-					-	-	

32)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bimbingan teknis program	57	287.684.800	-	33.720.000	20	30.000.000	20	63.720.000	35,09	22,15
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan program HIV	13		3		3		6	-	46,15	
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6326		1.421		1322		2743	-	43,36	
		Konsultasi Program	100		-		30		30	-	30,00	
		Pertemuan Sosialisasi Program HIV	19		-		-		0	-	-	
33)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penanganan dan Pengiriman Spesimen KLB	160	886.599.900	-	11.180.000	-	5.945.000	0	17.125.000	-	1,93
		jumlah peserta konsolidasi dan advokasi PSC	100		-		-		0	-	-	
		Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan KLB	25		-		-		0	-	-	
		Pelaksanaan TGC	9		-		-		0	-	-	
		Jumlah shift kegiatan P3K	1		-		1		1	-	100,00	
34)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi	70	574.815.400	-	-	-	119.706.909	0	119.706.909	-	20,83
		Jumlah paket pengadaan PMT	198		-		60		60	-	30,30	
35)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksana Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	286	83.879.200	3	2.660.000	3	14.310.000	6	16.970.000	2,10	20,23

		Pelatihan Kader Pos UKK	1		-		-		0	-	-	
		Pengukuran Kebugaraan Jemaah Haj	1		-		-		0	-	-	
		Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		-		-				-	
		Pertemuan Koordinasi dan Persiapan Pengukuran Calon Jemaah Haji	1		-		-				-	
36)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas	1	221.020.000	-	29.455.056	-	93.391.906	0	122.846.962	-	55,58
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12		3		3		6	-	50,00	
		Jumlah limbah medis yang dikelola	5.484		959		2.258,89		3217,89	-	58,68	
		Jumlah Dokumen pelaporan survey study EHRA	2,00		-		-		0		-	
37)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan	7	215.531.300	-	-	-	-	0	7.890.000	-	3,66
		Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan	6		-		-		0	-	-	
		Jumlah pengadaan pendukung PIK	4		-		-		0	-	-	
		Jumlah Penyuluhan di luar Gedung	48		-		24		24	-	50,00	
		Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan	22		-		-		0	-	-	

40)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah konsultasi program penyakit menular dan zoonosis	8	472.962.200	-	3.400.000	1	38.000.000	1	41.400.000	12,50	8,75
		Jumlah pertemuan evaluasi program endemik epidemik dan zoonosis	3		-		-		0	-	-	
		Jumlah Pertemuan sosialisasi program endemik epidemik dan zoonosis;	3				3		3	-	100,00	
		Kegiatan pengendalian vektor	80		-		11		11	-	13,75	
		Jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program ISPA, Diare, dan Hepatitis)	8		-		-		4	-	50,00	
41)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dari keluarga miskin yang dikhitan Jumlah ibu hamil atau bersalin yang mendapatkan pelayanan Jampersal	75	13.000.610.000	-	13.396.200	-	2.076.960.751	-	2.090.356.951	-	16,08
		Jumlah kegiatan verifikasi JKN	11052						-	-	-	
		Jumlah kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN	12		3		3		6		50,00	
		Jumlah Pembayaran Non Kapitasi	12		3		3		6	-	50,00	
		Jumlah Pembayaran PBI 60%	58035		75.120		75.120		75.120	-	129,44	
		Jumlah Pertemuan JKN	4						-		-	
		Pembayaran Jamkesda	12						-		-	

		Penyusunan Kerjasama dengan RS di luar PBI	2								-	
42)	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah deklarasi ODF	9	70.859.200	-	-	-	1.500.000	0	1.500.000	-	2,12
		Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi	2		-		-		0	-	-	
		Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota	1		-		-		0	-	-	
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat	12		-		-		0	-	-	
		Jumlah rapat koordinasi pra ODF	2		-		-		0	-	-	
		Jumlah verifikasi tingkat nasional	3		-		-		0	-	-	
		Pembinaan lingkungan bersih dan sehat	1								-	
43)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak SD yang mendapat Imunisasi	30000	58.040.000	-	-	-	12.750.000	-	12.750.000	-	21,97
		Jumlah Audit KIPi	10				5		5		100,00	
		Jumlah peserta pertemuan Audit KIPi	120		-		60		60	-	-	
		Jumlah peserta Pertemuan kegiatan BIAS dan IDL	516		-		-		-	-	-	
		Pengambilan Vaksin Rutin, BIAS, Haji dan Logistik	18		-		-		-	-	-	

	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah klinik yang melaksanakan penilaian akreditasi	2	29.994.900					-		-	
		Jumlah Pertemuan Sosialisasi Persiapan Penilaian Akreditasi	1						-		-	
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas		223.962.970		14.502.800		10.000.000		24.502.800	32,42	10,94
44)	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah jenis dokumen Profil Kesehatan	6	19.579.000	-	4.502.800	-		0	4.502.800	-	23,00
45)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN	13	129.319.200	3	10.000.000	3	10.000.000	6	20.000.000	46,15	15,47
		Jumlah Pembuatan aplikasi SIMPUS	1		-		-		0	-	-	
46)	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah perangkat Sistem Informasi Kesehatan	23	75.064.770	-	-	-	-	0	-	-	-
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik		66.483.900	-	4.580.800				4.580.800	100,00	6,89
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Pembinaan RS dan Faskes;	2	16.495.000								
47)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas	1	49.988.900	-	4.580.800	-	-	0	4.580.800	-	9,16

48)	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan jabatan fungsional	0	129.824.300	-				0		-	-
		Jumlah peserta pembinaan tenaga kesehatan teladan	3		-		-		0	-	-	
		Jumlah peserta Pertemuan pembinaan SDM per profesi	9		-		-		0	-	-	
		Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan	2		-		-		0	-	-	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			15.995.000	-		-					
49	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan penilaian Ijin Praktek Nakes dengan Organisasi Profesi dan DPMTSP	2	15.995.000	-		-					
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prevalensi Stunting Pada Baduta	12,04	202.019.900	100	1.171.000	100	19.945.500	100	21.116.500	100,00	10,45
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, optik, UMOT yang mendapat rekomendasi		26.998.100	-	-	-	2.300.000	0	2.300.000	-	8,52
50)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	Jumlah pengawasan dan pembinaan terhadap sarana kantin / warung sekolahJumlah sarana IRTTP yang diaudit	10	25.000.000	-	-	60	2.300.000	60	2.300.000	600,00	9,20

	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	tan yang mendapat bimbingan dan pengawasan										
		Jumlah pertemuan pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan	10		-		-		0	-	-	
		Jumlah realisasi pemanfaatan anggaran BOK kefarmasian	2000000 0									
		Jumlah sarana kesehatan yang mendapat bimbingan dan pengawasan	40									
51)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan data sarana kesehatan yang dikelola	1 laporan	1.998.100								
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang diaudit		157.000.000		1.171.000		16.920.500		18.091.500	100,00	11,52

52)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pertemuan PKP	2	157.000.000	-	1.171.000	-	16.920.500	0	18.091.500	-	11,52
		Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa	50		13		-		13	-	26,00	
		Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan penyuluhan	100		-		60		60	-	60,00	
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat rekomendasi		18.021.800		-	-	725.000		725.000	100,00	4,02
53)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Jasa Boga atau Rumah makan yang telah memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi	5	18.021.800	-	-		725.000	0	725.000	-	4,02

		Jumlah peserta orientasi Higiene Sanitasi jasa boga atau rumah makan	20									
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	53	334.402.100	-	-		3.828.000	0	3.828.000	-	1,14
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran		108.600.000	-	-		3.828.000	0	3.828.000	-	3,52
54)	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH	30	108.600.000	-	-		3.828.000	0	3.828.000	-	3,52
		Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS Tingkat Kota	2		-				0	-	-	
		Pengiriman Kontingen SBH	15		-				0	-	-	
		Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR	1		-				0	-	-	
		Seminar Implementasi KTR di Sekolah	50		-				0	-	-	
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	60	193.901.300	-	-		-	0	-	-	-

55)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah pembinaan Kelurahan Siaga Sehat	15	193.901.300	-	-	-	0	-	-	-
		Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga	60		-			0	-	-	
		Pembinaan RW Siaga dan evaluasi implementasi inovasi Germas	15		-			0	-	-	
		Promosi kesehatan dan Penggerakan masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau	526								
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan UKBM	120	31.900.800	-	-	-	0	-	-	-
56)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembinaan UKBM Percontohan	15	31.900.800	-	-	-	0	-	-	-
		Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader	150								
JUMLAH ANGGARAN TOTAL DINKES				86.240.359.768		14.225.154.298	15.076.427.000		29.476.148.218	32,02	34,18

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Cimahi sampai dengan triwulan II tahun 2021, mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2021, Angka Kematian Ibu (AKI) 140,55 /100.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) atau sebesar 4,92/1.000 KH atau. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) data baru diperoleh akhir tahun, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	100 per 100.000 KH	140,55 (6 kasus)	59,45
		Angka Kematian Bayi (AKB)	6,9 per 1000 KH	4,92 (21 kasus)	128,71
		Indeks Keluarga Sehat	0,415	-	-

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) sampai dengan triwulan II 2021 140,55/100.000KH dari target 100/100.000 KH dengan capaian 59,45%. Penyebab kematian ibu Penyebab Kematian ibu antara lain perdarahan 1 kasus, penyakit jantung 1 kasus, Covid 3 kasus dan kasus lain1 kasus. Secara umum masih ditemukan kasus kematian Ibu dan Bayi di Kota Cimahi disebabkan oleh Sistem rujukan belum berjalan optimal, Penyakit Penyerta pada Ibu hamil dan bersalin, Skirining kehamilan resiko tinggi belum optimal dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi yang masih rendah, serta adanya kasus COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi:

- a. Penguatan Pelayanan Kedaruratan Ibu dan Anak di Puskesmas terutama Puskesmas PONED
- b. Optimalisasi Program Call Center untuk perbaikan sistem rujukan

- c. Audit Maternal dan Perinatal, Pelacakan Kasus Kematian Ibu dan Bayi
- d. Optimalisasi program perencanaan kehamilan dan pencegahan komplikasi (P4K)
- e. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelayanan dalam Pelayanan kesehatan.

Penerapan SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berikut capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2018- Tahun 2021 semester II:

Tabel 5 Capaian SPM Bidang Kesehatan s.d Triwulan II Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2021		
					SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	94,66	95.09	88,19	10.480	4947	47,20
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	96,24	97.31	94,21	10.400	5008	48,15
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,42	94.95	91,67	9.950	4751	47,75
4	Pelayanan kesehatan balita	48,39	53.93	60,24	25.129	11857	47,18
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	69.94	87,59	69.586	23664	34,01
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	90,27	90.08	69,44	247.325	99572	40,26
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	58,78	70.26	63,92	31.712	29487	92,98
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	65,65	72.96	37,82	57.440	24869	43,30
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	96,8	98.36	100,81	9.716	4778	49,18
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	79,88	114.32	119,1	923	625	67,71
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	49,71	74.06	48,55	2.550	1488	58,35

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2021		
					SASARAN	CAPAIAN	%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV))	60,98	69.02	79,45	6326	2743	43,36

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kota Cimahi tahun 2021 yaitu : selama masa PPKM banyak kegiatan terutama kegiatan yang melibatkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan, Sarana skrining dan deteksi (BMHP dan Alat KIT pemeriksaan), pedoman pelaksanaan kasus serta media KIE sebagian tersedia /belum maksimal. Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Puskesmas, menyebabkan petugas puskesmas memegang rangkap program. Pada masa pandemi Puskesmas juga melakukan kegiatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) untuk penanganan Covid-19, hal ini menambah beban kerja Puskesmas. Sistem pencatatan dan pelaporan belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi :

- Pengkajian Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan pendukung SPM dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan.
- Mendorong Puskesmas untuk mengganggu penyediaan sarana dan prasarana yang belum dianggarkan oleh Dinas Kesehatan.
- Menjalin kerjasama lintas sektor seperti rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk pengumpulan data masyarakat yang dilayani diluar wilayah kerja.
- Meningkatkan kualitas pengawasan dari Dinas Kesehatan untuk perbaikan pelaksanaan pelayanan dan pencatatan pelaporan SPM Bidang Kesehatan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sedangkan target Program lainnya yang belum tercapai adalah: **Prevalensi Stunting**. Angka Stunting di Kota Cimahi samapai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah 11,80 dari target

12,04 atau capaian kinerja sebesar 98,01. Masih adanya kasus stunting di Kota Cimahi disebabkan oleh Pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang dan pengolahan makanan, kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan stunting :

- a. Sosialisasi Konvergensi Stunting
- b. Monitoring dan evaluasi konvergensi stunting
- c. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan dan MP ASI Untuk Balita dan Baduta Kurang Gizi Gakin
- d. Pemantauan Tumbuh kembang Balita di Posyandu
- e. Pemicuan 5 Pilar STBM Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. RENCANA KERJA PADA ANGGARAN PERUBAHAN 2021

Rencana kerja perubahan tahun 2021 mengalami perubahan secara signifikan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Perubahan Anggaran tahun 2021, terjadi penambahan anggaran terhadap total pagu anggaran Dinas Kesehatan. Penambahan ini adalah untuk mengakomodir beberapa perubahan kebijakan/regulasi termasuk kebijakan penanganan COVID-19, pemanfaatan kembali Silpa anggaran tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari Silpa JKN puskesmas, DAK fisik, bantuan provinsi serta untuk memenuhi adanya kebutuhan internal Dinas Kesehatan. Adapun Perubahan anggaran Dinas kesehatan pada tahun 2021 dari Rp. 86.240.359.768,- Menjadi Rp. 168.159.178.819,-. Rincioan perubahan dapat dilihat pada tabel

*Tabel 6 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan .
Sumber Anggaran*

NO	SUMBER ANGGARA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	APBN	-	18.755.299.000	18.755.299.000
	DAK FISIK	-	7.785.634.000	7.785.634.000
	DAK NON FISIK	-	10.969.665.000	10.969.665.000
2	APBD PROVINSI	-	9.676.800.000	9.676.800.000
3	APBD KOTA	64.347.158.120	115.168.271.398	50.821.113.278
4	KAPITASI JKN	21.893.201.648	20.824.647.171	-1.068.554.477
5	DBHCHT	-	3.607.511.250	3.607.511.250
	TOTAL	86.240.359.768	168.032.528.819	81.792.169.051

Berdasarkan tabel terlihat bahwa penambahan anggaran Dinas Kesehatan bersumber dari dana APBN DAK Fisik sebesar Rp. 7.785.634.000,- DAK Non FISIK Rp. 10.969.665.000,- APBD Provinsi sebesar Rp. 9.676.800.000,- APBD Kota sebesar Rp.

115.168.271.398,- DBHCT sebesar Rp. 3.607.511.250,-, kapitasi JKN sebesar Rp. 20.824.647.171

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020 yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 11) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 13) Pengadaan Mebel

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

8. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 18) Pembangunan Puskesmas
- 19) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 20) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 21) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 22) Pengadaan Obat, Vaksin

9. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 23) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 24) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 25) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 26) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- 27) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 28) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 29) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 30) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 31) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 32) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 33) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 34) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 35) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 36) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 37) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 38) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 39) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 40) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

- 41) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 42) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 43) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 44) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 45) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 46) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

10. Peningkatan Pelayanan BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas Cibeber

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Selatan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Tengah

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Utara

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas Cibeureum

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cigugur Tengah

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cipageran

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Citeureup

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Leuwigajah

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Asih

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Tengah

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirkaliki

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padasuka

47) Operasional Pelayanan Puskesmas

Operasional Pelayanan Puskesmas Cibeber

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Cimahi Selatan

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Cimahi Tengah

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Cimahi Utara

Operasional Puskesmas Puskesmas Cibeureum

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Cigugur Tengah

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Cipageran

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Citeureup

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Leuwigajah
 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Melong Asih
 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Melong Tengah
 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Pasirkaliki
 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Padasuka

- 48) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 49) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- 50) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- 51) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 52) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

12. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 53) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 54) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

13. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

- 55) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

14. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- 56) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- 57) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

15. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- 58) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 59) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

16. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

60) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

17. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

61) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

18. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

62) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

19. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

61) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

20. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

62) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021, terdiri dari 5 program, 19 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Setelah melalui analisis kebutuhan, KUA PPAS dan Pembahasan/koreksi pendapatan, penambahan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik serta Anggaran APBD I Provinsi Jawa Barat, DBHCT dan penyesuaian terhadap Kepmendagri No 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefisikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 terdiri dari 5 program, 19 kegiatan dan 58 sub kegiatan dengan jumlah anggaran mengalami penambahan sebesar Rp.

81.918.819.051,- dari Rp. 86.240.359.768,- menjadi Rp. 168.159.178.819,-. Selain itu, terdapat perubahan target dari indikator kinerja output dikarenakan sub kegiatan yang mendukung capaian program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan dengan perubahan.

Tabel 7 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Program

NO	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.367.123.780.-	74.780.593.392,-	32.413.469.612,-
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21.010.217.240.-	86.142.731.821,-	65.132.514.581,-
	BLUD Puskesmas	21.893.201.648.-	-	(21.893.201.648,-)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	433.395.100.-	7.038.980.606,-	6.605.585.506,-
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	202.019.900.-	48.139.000,-	(153.880.900,-)
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	334.402.100.-	148.734.000,-	(185.668.100,-)
	TOTAL	86.240.359.768,-	168.159.178.819,-	81.918.819.051,-

Adapun perubahan yang dilakukan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan antara lain :

1. Perubahan Indikator Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dijelaskan pada tabel 8
2. Pergeseran Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD semula berada pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat menjadi berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Penambahan sub kegiatan Antara lain :
 - a. Pembangunan Puskesmas.
Untuk pembangunan Puskesmas Cipageran dengan Sumber Anggaran DAK Fisik TA 2021
 - b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Untuk pengadaan alat ukur antropometri dan mobil promkes dengan sumber anggaran DAK Fisik TA 2021

- c. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kegiatan BOK Puskesmas untuk penunjang kegiatan UKM di Puskesmas dengan Sumber anggaran DAK Non Fisik TA 2021

4. Pengurangan kegiatan Antara lain :

- a. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- c. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

5. Penambahan anggaran kegiatan untuk penanganan COVID-19

- a. Pencegahan dan penanganan COVID-19 :
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Vaksin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 (ASN, Non ASN)
- b. Dukungan Program Vaksinasi yang bersumber DAU dan DBH : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta perubahan anggaran, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang Alasan Perubahan	Alasan Perubahan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	78 Nilai	42.367.123.780	74.756.593.392	32.389.469.612	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen				
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;		3 Dokumen	50.501.800	51.501.800	1.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran	Jumlah Dokumen anggaran	6 Dokumen	4 Dokumen	26.001.900	27.001.900	1.000.000	Penyesuaian Kebutuhan
		Jumlah Dokumen Renja Dinas	Jumlah Dokumen Renja Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Renstra Dinas	Jumlah Dokumen Renstra Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Anggaran (Siscobikes)	Laporan Anggaran (Siscobikes)	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	24.499.900	24.499.900		.-
		Jumlah Dokumen Laporan SPM	Jumlah Dokumen Laporan SPM	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen				

		Jumlah Dokumen Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Monev Kinerja	7 Dokumen	4 Dokumen				
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;		1 Dokumen	37.389.882.000	49.930.203.240	12.540.321.240	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	380 orang	380 orang	37.317.882.000	49.809.503.240	12.491.621.240	Penambahan untuk Insentif Nakes ASN
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan bulanan	Jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	72.000.000	96.700.000	24.700.000	Penyesuaian Kebutuhan
			Jumlah peserta pertemuan penyusunan laporan keuangan		290 Orang				
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Yang Dibina;		390 orang	299.905.000	212.315.000	(87.590.000)	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai	100 Set	100 Set	24.905.000	24.905.000	-	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	20 Pegawai	23 Pegawai	275.000.000	187.410.000	(87.590.000)	Penambahan untuk kegiatan pembinaan pegawai
			Jumlah peserta pembinaan pegawai		100 Pegawai			-	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;		12 Bulan	580.526.800	663.143.900	82.617.100	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.002.600	10.002.600	-	Penyesuaian Kebutuhan
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	85.807.700	115.888.900	30.081.200	Penyesuaian Kebutuhan
		Jumlah bulan Penyediaan ATK	Jumlah bulan Penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan				
		Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	1 Unit				

9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1 Paket	1 Paket	20.093.300	69.824.500	49.731.200	Penyesuaian Kebutuhan
			Jumlah unit belanja modal peralatan rumah tangga		9 Unit				
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	100.631.200	133.131.200	32.500.000	Penyesuaian Kebutuhan
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	189.000.000	159.304.700	(29.695.300)	Penyesuaian Kebutuhan
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	174.992.000	174.992.000	-	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan		12 Bulan	7.500.000	204.038.481	196.538.481	
13	Pengadaan Mebel		Jumlah pemeliharaan kursi		60 Unit	7.500.000	204.038.481	196.538.481	Penambahan untuk pengadaan meubelair Puskesmas Cipageran
		Jumlah pengadaan meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	43 Unit	43 Unit				
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan		12 Bulan	1.896.558.180	925.618.800	(970.939.380)	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air	12 Bulan	12 Bulan	1.010.123.580	89.884.200	(920.239.380)	Penyediaan Jasa Listrik dianggarkan oleh Puskesmas
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan				
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik	12 Bulan	12 Bulan				
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	886.434.600	835.734.600	(50.700.000)	Penyesuaian Kebutuhan
			Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian		18 orang				

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 Bulan	12 Bulan	2.142.250.000	1.969.125.000	(173.125.000)	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM		12 Bulan		1.036.500.000	945.550.000	(90.950.000)	Penyesuain Kebutuhan
		Jumlah unit kendaraan		27 Unit					
		Jumlah Unit Kendaraan yang diservice		3 Unit					
			Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional		12 Bulan				
			Jumlah bulan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional		12 Bulan				
			Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan		3 Unit				
			Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian		10 Orang			-	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.105.750.000	1.023.575.000	(82.175.000)	Penyesuain Kebutuhan
			Jumlah tenaga NON ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian		18 Orang				
			Jumlah Paket pemeliharaan gedung		3 Paket				
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80		100 Persen	-	20.824.647.171	20.824.647.171	Pergeseran dari Program pemenuhan UKP UKM sesuai Kepmendagri No 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

									Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Padasuka)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		12.918 orang		1.972.750.498		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		80,89 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Melong Asih)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		10.304 orang		1.555.897.334		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		78,35 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Melong Tengah)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Melong Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		6.143 orang		954.446.800		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		78,97 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PuskesmasCigugur tengah)		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Cigugur tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		10.892 orang		1.739.902.758		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		79,01 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Cimahi Selatan)		Jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas Cimahi Selatan yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		10.752 orang		1.634.882.060		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,54 Nilai				

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Cipageran)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		11.982 orang		1.949.459.500		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		80,36 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Cimahi Tengah)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		12.481 orang		1.742.428.580		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,46 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Citeureup)		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Citeureup yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		9.243 orang		1.381.445.709		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,39 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Cimahi Utara)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		14.681 orang		2.762.477.877		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,23 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasirkaliki)		Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		4.725 orang		729.368.701		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		80,60 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Cibeureum)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		14.032 orang		2.101.147.951		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		89,67 Nilai				

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Cibeber)		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		6.635 orang		1.030.620.600		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,80 Nilai				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Leuwigajah)		Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas Leuwigajah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		8.115 orang		1.269.808.793		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		80,71 Nilai				
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting Pada Baduta		12,04		21.010.217.240	84.768.081.821	63.757.864.581	
			Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama		69,23 Persen				
			Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan		83 Persen				
			Prevalensi stunting pada balita		10,8 Persen				
			Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)		96 Persen				
			Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin		100 Persen				
			Tingkat Pengobatan TB yang berhasil		90 Persen				
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		90 Persen				
			Persentase Kasus dan KLB yang ditangani		100 Persen				

9	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;	Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;	13 PKM	13 PKM	2.445.108.270	23.772.038.784	21.326.930.514	
19	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pembangunan gedung baru puskesmas		1 Unit	-	15.524.089.000	15.524.089.000	Pembangunan Puskesmas Cipageran
			Jumlah Pembangunan sarana IPAL		1 Unit				
			Jumlah laporan perencanaan IPAL		1 Laporan				
			Jumlah dokumen manajemen Kontruksi		1 Laporan				
			Jumlah bulan jasa pendukung kegiatan pembangunan puskesmas		12 Bulan				
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah bulan penyewaan gedung / gudang		6 Dokumen		159.948.000	2.180.824.885	2.020.876.885	Rehabilitasi Puskesmas
		jumlah ipal yang diperbaiki		2 Dokumen					
		jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan		12 Puskesmas					
			Jumlah dokumen perencanaan		2 Dokumen				
			Jumlah dokumen pengawasan		2 Dokumen				
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan		4 uskesmas				
			Jumlah peserta rapat persiapan rehabilitasi puskesmas		50 Orang				
21	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah unit antropometri		13 unit		832.000.000	832.000.000	Pengadaan alat antropometri
			Jumlah unit mobil promkes		1 unit				Pengadaan Mobil promkes
22	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan		7 Unit		144.000.000	4.108.948.899	1.967.788.629	Pengadaan Cipageran alat kesehatan untuk pkm Cipageran

		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik		3 PKM					
			Jumlah pengadaan alat kesehatan		53 Unit				
			Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik		3 Puskesmas				
			Jumlah pengadaan alat kesehatan (AKI/AKB)		2 paket				
23	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis BMHP Jumlah		60 Jenis		2.141.160.270	4.108.948.899	1.967.788.629	Penambahan untuk pengadaan obat COVID-19
		jenis pengadaan obat		100 Jenis					
		Jumlah pengadaan Vaksin		1 Jenis					
			Jumlah jenis pengadaan obat Yandas		100 Jenis				
			Jumlah jenis pengadaan obat Covid		3 jenis				
			Jumlah jenis pengadaan Reagen dan BMHP		50 Jenis				
			Jumlah peserta pertemuan pengelola obat dan Perbekkes Puskesmas		35 Orang				
			Jumlah kegiatan bongkar muat obat		100 Kali				
10	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1) Jumlah Indikator SPM dengan capaian 83% ;		10 indikator	18.274.662.100	60.378.323.367	42.103.661.267	Penambahan untuk pembayaran kepesertaan JKN
			2) Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN)		3,3 persen				
			3) Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani		100 persen				

			4) Cakupan penyelidikan Epidemiologi yang ditangani		100 persen				
			5) Jumlah Kelurahan ODF		4 Kelurahan				
			6) Jumlah bulan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) ;		12 bulan				
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah peserta Pertemuan sosialisasi program kesehatan ibu dan anak		300 orang		155.690.000	537.882.700	382.192.700	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11528 orang	10.480 Orang				
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG	20 Kali	20 Kali				
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Rujukan		6 Perjanjian				
			Jumlah kunjungan supervisi AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan		260 kali				
			Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB		55 orang				
			Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes Tingkat pertama & rujukan		35 orang				
			Jumlah peserta peningkatan SDM tingkat Kota Cimahi-ANC		60 orang				
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.004 Orang	10.400 Orang	504.000.000	1.771.143.700	1.267.143.700	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Penguatan program EMAS	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	12 Orang	12 Orang				
			Persentase penyerapan anggaran Jampersal		Persen 100				

			Jumlah peserta surveillance KIA, Audit Maternal Perinatal		320 Orang				
			Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB terkait kespro & KB		50 Orang				
			Jumlah surveillance autopsi verbal kematian itu & bayi		72 Orang				
			Jumlah peserta surveillance response kematian ibu & bayi		50 Orang				
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.696 Orang	9.950 Orang	120.000.000	111.321.200	(8.678.800)	
		Jumlah peserta pelatihan/ penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED	Jumlah peserta pelatihan/ penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED	40 Orang	40 Orang				
			Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan		180 orang				
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51.988 Orang	25.129 Orang	12.099.500	601.773.600	589.674.100	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Dokumen reviu PERDA KIBBLA	Dokumen reviu PERDA KIBBLA	1 Laporan	1 Laporan				
			Jumlah peserta kegiatan penguatan guru PAUD tentang buku KIA & SDIDTK		330 orang				
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.223 orang	69.586 orang	213.900.000	368.204.000	154.304.000	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Pembinaan Sekolah Sehat		12 sekolah					
		Pertemuan Program UKS	Jumlah peserta Pertemuan Program UKS	34 orang	34 orang				
			Jumlah Display Data hasil kegiatan UKS		9 Unit				

29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Deteksi dini Faktor Risiko PTM bagi ASN Tingkat Kota Cimahi	Jumlah ASN yang mendapatkan Deteksi dini Faktor Risiko PTM	1.250 Orang	1.250 Orang	285.740.000	238.991.400	(46.748.600)	Penyesuaian Kebutuhan
		Deteksi IVA Test	Jumlah orang yang mendapatkan Deteksi IVA Test	1.500 Orang	1.500 Orang				
		Jasa Petugas Penunjang P2PTM Keswa	Jumlah Jasa Petugas Penunjang P2PTM Keswa yang difasilitasi	286 Orang	286 Orang				
		Jumlah penduduk usia 15-59 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah penduduk usia 15-59 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	368.206 Orang	247.325 Orang				
		Penguatan pandu PTM di FKTP	Penguatan pandu PTM di FKTP	82 Orang	82 Orang				
		Jumlah peserta kegiatan monev Usia Produktif	Jumlah peserta kegiatan monev Usia Produktif	144 Orang	144 Orang				
		Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi hari Pendengaran Sedunia	Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi hari Pendengaran Sedunia	6 Perusahaan	6 Perusahaan				
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia		30 orang		133.050.000	206.432.500	73.382.500	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Jumlah penduduk usia 60 tahun skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	49.506 Orang	31.712 Orang				
			Jumlah peserta kegiatan bulan pemeriksaan lansia	615 Orang	615 Orang				
			Jumlah alat/bahan kegiatan bulan pemeriksaan lansia	13 Unit	13 unit				
		Jumlah peserta Pertemuan Program Lanjut usia	Jumlah peserta Pertemuan Program Lanjut usia	80 Orang	80 Orang				
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	175.157 Orang	57.440 Orang	110.550.000	203.149.200	92.599.200	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas fasyankes	Jumlah Peserta Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas fasyankes	118 Orang	98 Orang				

		Sosialisasi dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi	Jumlah peserta skrining dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi	450 Orang	3.000 Orang				
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9.638 Orang	9.716 Orang	110.550.000	172.995.000	62.445.000	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Jumlah peserta Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes	Jumlah peserta Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes	144 Orang	98 Orang				
		Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi	Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi	450 Orang	3.300 Orang				
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah	Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah	288 Kali	Kali 288	173.076.000	231.062.900	57.986.900	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	775 orang	Orang 923				
			Jumlah peserta Pelatihan kesehatan jiwa bagi masyarakat		Orang 113				
		Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD	Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD	26 Kali	Kali 26				
		Jumlah peserta Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	Jumlah peserta Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	78 Orang	Orang 78				
		Penguatan Jejaring Lintas Sektor dan Lintas Program		1 kali					
		Monitoring dan evaluasi Rakor TPKJM dan NAPZA		1 kali					
		Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA		1 kali					
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	11.800 Orang	2.576 Orang	334.315.800	284.794.300	(49.521.500)	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Bimbingan teknis program TB ke RS dan Puskesmas		38 kali					

		Konsultasi Program TB		4 kali					
		Monitoring dan evaluasi Program TB		6 kali					
		Sosialisasi Program TB		10 kali					
			Jumlah peserta jejaring internal hospital linkage.		90 Orang				
			Jumlah Investigasi Kontak		250 Kasus				
			Bulan bulan jasa tenaga Administrator Penyakit Menular		12 Bulan				
			Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi program P2PM		38 Orang				
			Jumlah peserta Sosialisasi Program TB		64 Orang				
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bimbingan teknis program	Jumlah peserta Bimbingan teknis program	3 kali	57 Orang	287.684.800	284.605.000	(3.079.800)	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
		Jumlah kegiatan pengelola pelayanan program HIV	Jumlah bulan jasa pengelola pelayanan program HIV	13 Bulan	12 Bulan				
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	14.197 Orang	6.391 Orang				
		Konsultasi Program		4 kali					
		Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Program HIV	Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Program HIV	19 Orang	19 Orang				
			Jumlah peserta kegiatan mobile VCT		100 Orang				
			Jumlah peserta pemetaan populasi risti		120 Orang				
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penanganan dan Pengiriman Spesimen KLB		160 sampel		886.599.900	5.796.944.100	4.910.344.200	Penamambahan untuk bahan pemeriksaan COVID-19, P3K, dan anggaran hibah PMI
		jumlah peserta konsolidasi dan advokasi PSC		100 orang					

		Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan KLB		25 orang					
		Pelaksanaan TGC		6 orang					
		Pelayanan P3K		1 paket					
			Jumlah paket bahan pemeriksaan PCR	2.000 Paket	2.000 Paket				
			Jumlah paket bahan pemeriksaan rapid antigen	10.000 Paket	10.000 Paket				
			Jumlah obat-obatan untuk P3K	1 Paket	1 Paket				
			Jumlah BHP untuk P3K	1 Paket	1 Paket				
			Jumlah shift kegiatan P3K dan Penanggulangan Bencana TGC	122 Shift	296 Shift				
			Jumlah bulan jasa tenaga administrasi pengelolaan KLB	12 Bulan	12 Bulan				
			Persentase realisasi anggaran hibah PMI	100 Persen	100 Persen				
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah peserta pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi	70 Orang	0 Orang	574.815.400	1.583.568.400	1.008.753.000	Penambahan DAK Non FISIK untuk penanganan Stunting
		Pengadaan PMT Lokal	Jumlah paket pengadaan PMT	198 Orang	198 Orang				
			Jumlah petugas pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (TTD rematri)		420 Orang				
			Jumlah peserta pertemuan pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (EPPGM)		65 orang				
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelatihan kader Pos UKK	Jumlah kader Pos UKK yang dilatih	1 kali	30 Kader	83.879.200	126.101.000	42.221.800	Penambahan DAK Non FISIK
		Pelaksana Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kegiatan pengelolaan program pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	13 Kali	6 Kali				

		Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji Indonesia	Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji Indonesia	1 kali	0 Orang				
		Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 kali					
		Pertemuan Koordinasi dan Persiapan Pengukuran Calon Jemaah Haji		1 kali					
			Jumlah ASN yang diperiksa kebugaran		550 Orang				
			Jumlah karyawan instansi swasta yang diperiksa kebugaran		175 Orang				
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas pelayanan kesehatan	1 Kali	30 Sampel	221.020.000	712.215.500	491.195.500	Penambahan DAK Non FISIK
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Kali	12 Bulan				
		Jumlah limbah medis yang dikelola	Jumlah limbah medis yang dikelola	5.484 Kg	10.919 Kg				
		Jumlah Dokumen Pelaporan Survey Study EHRA	Jumlah Dokumen Pelaporan Survey Study EHRA	2 Dokumen	1 Dokumen				
			Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas sosialisasi teknis TTG SAM rumah tangga bagi sanitarian		30 Orang				
			Jumlah Pemeriksaan sampel sarana air minum masyarakat		75 Sampel				
			Jumlah peserta pertemuan pengawasan eksternal orientasi higiene sanitasi DAM untuk pengelola/penjamah		30 Orang				
			Jumlah Pemeriksaan sampel Depot Air Minum (DAM)		60 Sampel				
40	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan	7 Jenis	3 Jenis	215.531.300	744.055.100	528.523.800	Penambahan DAK Non FISIK
		Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan	6 Unit	4 Unit				

		Jumlah pengadaan pendukung PIK	Jumlah pengadaan pendukung PIK	4 Unit	1 Unit				
		Jumlah Penyuluhan di luar gedung	Jumlah Penyuluhan di luar gedung	48 Kali	0 Kali				
		Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan	Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan	22 Kali	0 Kali				
		Jumlah peserta Pembinaan dan monev program	Jumlah peserta Pembinaan dan monev program	35 Orang	35 Orang				
			Jumlah peserta pertemuan Orientasi KPP		50 Orang				
			Jumlah peserta kegiatan kampanye Lokal		200 Orang				
			Jumlah peserta kegiatan Intervensi Promkes		120 Orang				
			Jumlah peserta pertemuan kemitraan		40 Orang				
41	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah bulan jasa pengelola administrasi program surveilans	Jumlah bulan jasa pengelola administrasi program surveilans	13 Bulan	12 Bulan	149.999.900	119.888.000	(30.111.900)	Penyesuain Kebutuhan
		Jumlah laporan Penemuan Kasus Non PD3I	Jumlah laporan Penemuan Kasus Non PD3I	12 Laporan	12 Laporan				
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Jemaah haji	Jumlah peserta pertemuan kegiatan Jemaah haji	556 Orang	556 Orang				
			Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan kasus PD3I dan Pelaporan entry data SKDR		13 Orang				
			Jumlah peserta pertemuan koordinasi pemeriksaan jemaah haji		90 Orang				
		Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE)	Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE)	56 Sampel	56 Sampel				
		Jumlah peserta pertemuan Evaluasi program surveilans	Jumlah peserta pertemuan Evaluasi program surveilans	200 Orang	13 Orang				

		Pembuatan Aplikasi e_surveilans		1 paket					
		Pertemuan Kegiatan SKDR penyakit potensial wabah PD3I		50 orang					
42	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar		4414 KK		69.694.000	59.500.000	(10.194.000)	Penyesuaian Kebutuhan
		Jumlah kunjungan laboratorium		55375 orang					
		Jumlah Kunjungan rawat jalan gigi		55375 orang					
		Jumlah pertemuan koordinasi PIS-PK	Jumlah peserta pertemuan koordinasi PIS-PK	4 kali	Orang 156				
		Jumlah pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan	Jumlah peserta pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan	2 kali	Orang 100				
			Jumlah peserta pertemuan pengelolaan upaya kesehatan khusus		Orang 160				
			Jumlah bulan jasa tenaga IT kegiatan PIS PK		Bulan 12				
43	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program ISPA, Diare, dan Hepatitis	Jumlah peserta pertemuan evaluasi dan sosialisasi program ISPA, Diare, dan Hepatitis	8 Kali	57 Orang	472.962.200	787.012.200	314.050.000	Penambahan dari anggaran DAK non fisik
			Jumlah peserta pertemuan program endemik epidemik dan zoonosis		120 Orang				
			Jumlah Kegiatan pengendalian vektor		58 Kali				
			Jumlah kegiatan Pendampingan pelayanan dokter spesialis pada pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas		13 Kali				
			Pengadaan belanja bahan habis pakai alat kedokteran		1 Paket				
		Jumlah konsultasi program penyakit menular dan zoonosis		8 Kali					

		Jumlah Pertemuan sosialisasi program endemik epidemik dan zoonosis;		3 Kali					
		Kegiatan pengendalian vektor		80 Kali					
44	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan	75 Orang		13.000.610.000	35.438.279.567	22.437.669.567	Penambahan untuk pembayaran kepesertaan JKN
		Jumlah ibu hamil atau bersalin yang mendapatkan pelayanan Jampersal		12 Bulan					
		Jumlah kegiatan verifikasi JKN		12 bulan					
		Jumlah pembayaran non kapitasi		12 bulan					
		Penyusunan Kerjasama dengan RS di luar PBI		2 kali					
		Jumlah peserta Pertemuan JKN		70 Orang					
		Jumlah kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN	Jumlah kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN	13 Bulan	12 Bulan				
		Jumlah pembayar PBI 60%	Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 60%	58.035 Orang	Orang 75.120				
			Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 40%	75.120 Orang	Orang 75.120				
		Pembayaran Jamkesda	Jumlah bulan Pembayaran Pelayanan Kesehatan maskin di luar peserta JKN	12 Bulan	Bulan 12				
45	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah paket Evaluasi lingkungan bersih dan sehat	3 Paket	0 Paket	70.859.200	45.190.000	(25.669.200)	Penyesuaian Kebutuhan
		Jumlah deklarasi ODF	Jumlah deklarasi ODF	9 Kelurahan	2 Kelurahan				

		Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi	Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi	2 Kali	1 Kali				
		Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota	Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota	1 Kali	13 Kali				
		Jumlah rapat koordinasi tim pembina kota sehat	Jumlah peserta pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat	12 kali	30 Orang				
		Jumlah peserta rapat koordinasi pra ODF	Jumlah peserta rapat koordinasi pra ODF	2 kali	91 Orang				
		Jumlah verifikasi tingkat nasional		3 kali					
		Pembinaan lingkungan bersih dan sehat		1 Kali					
46	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah jasa pendampingan konsulen KIPi		10 bulan	0	8.946.550.000	8.946.550.000	Penambahan Sub kegiatan untuk penanganan COVID-19
			Jumlah paket asuransi KIPi vaksin Covid 19		1 paket				
			Jumlah pembelian Trash bag sampah medis		4.592 Pak				
			Jumlah jenis bahan habis pakai; belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor		3 jenis				
			Jumlah bulan jasa tenaga Admininstrasi/tenga ahli IT		10 bulan				
			Jumlah jasa tim vaksinasi Covid 19		59.500 OH				
47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas/Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah bulan jasa THL BOK Puskesmas		3 Bulan		477.000.000	477.000.000	Anggaran DAK Non FISIK Puskesmas, menjadi Operasional pelayanan kesehatan gaji THL BOK di Puskesmas
48	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah klinik yang melaksanakan penilaian akreditasi		2 Unit		29.994.900	370.839.000	340.844.100	Penyesuaian kebutuhan

		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi	7 Unit	7 Unit				
		Jumlah Pertemuan Sosialisasi Persiapan Penilaian Akreditasi		1 kali					
49	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak SD yang mendapat Imunisasi		3000 orang		58.040.000	158.825.000	100.785.000	Penambahan anggaran untuk asuransi KIPi
		Jumlah Audit KIPi		10 kasus					
		Jumlah peserta Pertemuan kegiatan BIAS dan IDL		516 orang					
		Pengambilan Vaksin Rutin, BIAS, Haji dan Logistik		18 kali					
		Jumlah peserta pertemuan Audit KIPi	Jumlah peserta pertemuan Audit KIPi	120 Orang	38 Orang				
			Jumlah peserta pertemuan koordinasi pelaksanaan imunisasi BIAS		176 Orang				
			Jumlah peserta pertemuan persiapan pelaksanaan vaksin	140 Orang	150 Orang				
			Persentase realisasi asuransi KIPi	100 Persen	100 Persen				
11	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	95 Persen	95 Persen	223.962.970	214.000.470	(9.962.500)	
50	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Jenis dokumen informasi kesehatan	Jumlah jenis dokumen buku Profil Kesehatan	6 Dokumen	2 Jenis	19.579.000	19.579.000	-	
			Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil		36 Orang			-	

51	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN	13 Bulan	12 Bulan	129.319.200	72.452.700	(56.866.500)	Refocuisng Anggaran : kegiatan Blue print tidak dilaksanakan
		Jumlah pembuatan aplikasi simpus		1 paket					
			Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan aplikasi SIMPUS	92 Orang	92 Orang				
			Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan Blue Print	44 Orang	0 Orang				
			Jumlah pengadaan Harddisk eksternal	5 Unit	5 Unit				
			Jasa Tenaga Pembuatan Blue Print	8 Bulan	0 Bulan				
52	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah perangkat Sistem Informasi Kesehatan		23 unit		75.064.770	121.968.770	46.904.000	Penamabahan untuk pengadaan komputer, laptop, Video conference untuk mendukung kegiatan rapat Daring
			Jumlah Pengadaan perangkat Komputer		1 Unit				
			Jumlah Pengadaan Printer		7 Unit				
			Jumlah Pengadaan perangkat Laptop		5 Unit				
			Jumlah Perlengkapan Video Conference		1 set				
			Jumlah Camera Video		1 set				
12	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	3 PKM	3 PKM	66.483.900	403.719.200	337.235.300	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas		2 kali		16.495.000		(16.495.000)	Sub kegiatan tidak dilaksanakan

53	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas		1 dokumen		49.988.900	403.719.200	353.730.300	Penambahan untuk kegiatan akreditasi dan penilaian kinerja Puskesmas
		Jumlah laporan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat		1 Laporan					
		Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		2 kali					
			Jumlah peserta pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas		45 Orang				
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah peserta pertemuan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat		45 Orang				
			Jumlah peserta pertemuan Akreditasi untuk Puskesmas		120 Orang				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas		100 persen		21.893.201.648		(21.893.201.648)	Pergeseran dari Program pemenuhan UKP UKM sesuai Kepmendagri No 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	95 Persen	95 Persen	433.395.100	8.310.980.606	7.893.580.506	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					15.995.000		(15.995.000)	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan penilaian Ijin Praktek Nakes dengan Organisasi Profesi dan DPMTSP		2 kali		15.995.000		(15.995.000)	Sub kegiatan tidak dilaksanakan

13	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDMK ;	Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDMK ;	1 dokumen	1 dokumen	417.400.100	8.310.980.606	7.893.580.506	
54	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah pelaksanaan uji kompetensi		2 kali		287.575.800	2.922.000.000	2.634.424.200	Penambahan untuk insentif Nakes Non ASN
		Jumlah Pertemuan Internship Dokter		8 kali					
		Jumlah Pertemuan Rencana Pemenuhan Kebutuhan tenaga kesehatan		4 kali					
		Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pelatihan		4 kali					
			Jumlah Nakes Non ASN yang mendapatkan insentif		330 OH				
55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan jabatan fungsional	Jumlah peserta pembinaan jabatan fungsional	4 kali	35 Orang	129.824.300	5.388.980.606	5.259.156.306	Penambahan untuk insentif Nakes Non ASN
		Jumlah pembinaan tenaga kesehatan teladan	Jumlah peserta pembinaan tenaga kesehatan teladan	3 kali	0 Orang				
		Jumlah Pertemuan pembinaan SDMK per profesi	Jumlah peserta Pertemuan pembinaan SDMK per profesi	9 kali	105 Orang				
		Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan	Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan	2 kali	2 kali				
			Jumlah tenaga yang mendapat insentif Covid		800 Orang				
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standard	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standard	100 Persen	100 Persen	202.019.900	48.139.000	(153.880.900)	

14	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan	Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan	100 Persen	100 Persen	26.998.100	2.300.000	(24.698.100)	
56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan		60 Orang	25.000.000	2.300.000	(22.700.000)	Penyesuaian Kebutuhan
			Jumlah peserta pembinaan PJAS		0 Orang				
		Jumlah pengawasan dan pembinaan terhadap sarana kantin / warung sekolahJumlah sarana IRTTP yang diaudit		10 kali					
		Jumlah pertemuan pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan		10 kali					
		Jumlah realisasi pemanfaatan anggaran BOK kefarmasian		200000 00 Rupiah					
		Jumlah sarana kesehatan yang mendapat bimbingan dan pengawasan		40 sarana					
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan data sarana kesehatan yang dikelola		1 laporan		1.998.100		(1.998.100)	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan

15	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang diaudit	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100 Persen	100 Persen	157.000.000	37.914.000	(119.086.000)	
57	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pertemuan PKP	Jumlah peserta pertemuan PKP	2 kali	120 Orang	157.000.000	37.914.000	(119.086.000)	Penyesuaian Kebutuhan
		Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa	Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa	50 Sampel	50 Sampel				
		Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan penyuluhan	Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan penyuluhan	100 Sarana	120 Sarana				
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persenatse TPM yang mendapat rekomendasi	Persenatse TPM yang mendapat rekomendasi	100 Persen	100 Persen	18.021.800	7.925.000	(10.096.800)	
58	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah peserta pelatihan laik Hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM)	Jumlah peserta pelatihan laik Hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM)	5 unit	25 Orang	18.021.800	7.925.000	(10.096.800)	Penyesuaian Kebutuhan

		Jumlah Jasa Boga atau Rumah makan yang telah memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi		5 unit					
		Jumlah peserta orientasi Higiene Sanitasi jasa boga atau rumah makan		20 orang					
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	53 Persen	53 Persen	334.402.100	148.734.000	(185.668.100)	
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	10 Persen	10 Persen	108.600.000	23.775.000	(84.825.000)	
59	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH	Pembinaan dan Pengembangan SBH	30 Orang	15 Orang	108.600.000	23.775.000	(84.825.000)	Penyesuaian kebutuhan pengiriman kontingen SBH dan adokasi Perwal KTR tidak dapat dilaksanakan
		Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS tingkat kota	Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS	2 Kali	1 Kali				
		Pengiriman Kontingen SBH		15 Orang					
		Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR		1 Dokumen					
		Seminar implementasi KTR di sekolah		50 sekolah					
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	60 Persen	60 Persen	193.901.300	95.015.000	(98.886.300)	
60	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta pembinaan Pokja Kelurahan Siaga Sehat	Jumlah peserta pembinaan Kelurahan Siaga Sehat		30 Orang	193.901.300	95.015.000	(98.886.300)	Penyesuaian kebutuhan

		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga	Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga	60 Orang	30 Orang				
		Promosi kesehatan dan Penggerakan masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau	Promosi kesehatan dan Penggerakan masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau	526 Orang	0 Orang				
		Jumlah Pokja Kelurahan Siaga yang dibina		15 unit					
19	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan UKBM	Jumlah peserta pembinaan UKBM	120 Orang	120 Orang	31.900.800	29.944.000	(1.956.800)	
61	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembinaan UKBM Percontohan		15 Kelurahan	0 Kelurahan	31.900.800	29.944.000	(1.956.800)	Penyesuaian kebutuhan
		Jumlah peserta Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader	Jumlah peserta Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader	150 Orang	40 Orang				
			Jumlah peserta pembinaan UKBM		80 Orang				
	TOTAL					86.240.359.768	168.032.528.819	81.792.169.051	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 ini merupakan Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi Wali Kota Cimahi kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.

Penyusunan rencana kerja perubahan dinas kesehatan tahun 2021 dimaksudkan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan kebijakan terkait penanganan COVID-19, Kepmendagri No 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sekaligus penyesuaian dengan program dan kegiatan dalam perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 ini. Kemudian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan di Kota Cimahi.

Harapan kami, mudah-mudahan penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2021 ini dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam penyusunan rencana kerja di tahun berikutnya yang dapat mengakomodir program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD khususnya dan pemerintah kota pada umumnya. Semoga rencana kerja perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

LAMPIRAN

